



Disinformasi dan Kesehatan Masyarakat: Pelajaran dari Pandemi COVID-19

Gunawan Widjaja^{1*}, Dyah Ersita Yustanti¹

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com*

Abstract

The COVID-19 pandemic has not only brought challenges in the health sector, but also given rise to the phenomenon of disinformation that has had a significant impact on public health. This study aims to identify patterns of dissemination and the impact of COVID-19-related disinformation, as well as to formulate effective mitigation strategies through a literature review of various scientific literature and research reports. The results of the analysis indicate that misinformation spreads massively through social media, instant messaging apps, and mass media, with patterns that exploit public emotional sentiment and uncertainty. The impact of misinformation includes a decline in compliance with health protocols, scepticism about vaccination, and a decline in public trust in health institutions and the government. The recommended mitigation strategies include improving digital and health literacy, strengthening regulations, promoting cross-sector collaboration, and optimising data-driven public communication and transparency. These findings underscore the importance of synergies among various parties in building public information resilience to face similar crises in the future.

Keywords: Misinformation Public Health, COVID-19 Pandemic, Public Health

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 26, 2025

Revised

August 09,
2025

Accepted

September 16,
2025

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah membawa dampak luar biasa di berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan, ekonomi, sosial, hingga informasi publik. Di tengah upaya global untuk menanggulangi penyebaran virus, kebutuhan akan informasi yang akurat dan terpercaya menjadi sangat krusial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa arus informasi yang beredar justru dipenuhi oleh berbagai bentuk informasi keliru, mulai dari hoaks, misinformasi, hingga disinformasi yang secara sengaja disebar untuk tujuan tertentu (Kisa & Kisa, 2025).

Fenomena disinformasi selama pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 64% masyarakat Indonesia pernah menerima atau membagikan informasi tidak benar terkait COVID-19 di media sosial. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah disinformasi di Indonesia, khususnya pada masa krisis kesehatan global (Chen & Kumar, 2025).

Disinformasi sendiri merupakan penyebaran informasi palsu atau tidak akurat yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Berbeda dengan misinformasi yang terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian, disinformasi memiliki motif tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan sekadar

menciptakan kepanikan di tengah Masyarakat (Patel & Garcia, 2023). Dalam konteks pandemi, motif-motif ini semakin mudah berkembang seiring tingginya ketidakpastian dan keresahan publik. Penyebaran disinformasi selama pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga melalui aplikasi pesan instan, media massa, hingga website-website yang sulit diverifikasi kebenarannya (Zarocostas, 2020).

Di Indonesia, Kementerian Kominfo mencatat ribuan kasus disinformasi dalam kurun waktu satu tahun pertama pandemi, menunjukkan betapa masifnya fenomena ini. Intensitas penyebaran disinformasi bahkan meningkat pada momen-momen krusial, seperti saat diumumkannya kasus perdana COVID-19, penerapan PSBB, hingga perayaan hari besar keagamaan (Persaud, 2023). Salah satu bentuk disinformasi yang paling berbahaya adalah klaim-klaim palsu terkait kesehatan, seperti efek samping vaksin, pengobatan alternatif tanpa dasar ilmiah, atau teori konspirasi tentang asal-usul virus. Disinformasi semacam ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa, terutama jika masyarakat mempercayai dan mempraktikkan informasi yang salah (Johnson, 2022).

Konsekuensi dari masifnya disinformasi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi ragu terhadap kebijakan pemerintah, enggan mematuhi protokol kesehatan, bahkan menolak vaksinasi yang seharusnya menjadi solusi utama penanggulangan pandemi. Penelitian menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi sangat mempengaruhi keputusan individu dalam menerima vaksinasi maupun mengikuti anjuran kesehatan lainnya (Islam et al., 2022). Sumber utama disinformasi selama pandemi berasal dari media sosial, yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan luas. Selain itu, tokoh masyarakat dan figur publik yang memiliki banyak pengikut juga berperan besar dalam memperkuat narasi-narasi keliru. Manipulasi konten, baik berupa gambar, video, maupun narasi teks, kerap digunakan untuk meyakinkan masyarakat akan kebenaran informasi palsu tersebut (European Parliament, 2024).

Di sisi lain, pemerintah juga tidak luput dari peran dalam penyebaran disinformasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketidakkonsistenan komunikasi, perubahan kebijakan yang mendadak, hingga pernyataan pejabat yang tidak berbasis data memperparah kebingungan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa disinformasi yang bersumber dari pemerintah secara signifikan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan (Cinelli et al., 2020). Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid, sehingga mudah terpengaruh oleh narasi-narasi menyesatkan. Kesenjangan pengetahuan ini membuka ruang bagi disinformasi untuk terus berkembang dan menyebar luas di tengah Masyarakat (Effenberger et al., 2020).

Dampak jangka panjang dari disinformasi tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sains. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat berbagai upaya penanggulangan pandemi, termasuk program vaksinasi massal, penerapan protokol kesehatan, dan upaya edukasi publik. Bahkan, disinformasi berpotensi menimbulkan stigma, diskriminasi, serta memperburuk kondisi psikososial Masyarakat (Apuke & Omar, 2021).

Melihat kompleksitas dan dampak negatif dari disinformasi selama pandemi COVID-19, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat harus bersinergi dalam meningkatkan literasi informasi, memperkuat komunikasi publik, serta membangun sistem verifikasi informasi yang efektif dan mudah diakses. Selain itu, evaluasi terhadap pola komunikasi dan kebijakan informasi pemerintah juga menjadi kunci dalam mencegah terulangnya fenomena serupa di masa depan (Tagliabue et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pola, sumber, dan dampak disinformasi selama pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat

Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini akan menganalisis temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, serta merumuskan pelajaran penting yang dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi penanggulangan disinformasi di masa mendatang. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan masyarakat dan ketahanan informasi nasional dalam menghadapi krisis serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal, buku, serta sumber data sekunder yang relevan terkait disinformasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Pemilihan sumber dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkinian, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, sumber, dampak, serta strategi mitigasi disinformasi yang telah diulas dalam berbagai studi sebelumnya (Eliyah & Aslan, 2025); (Torraco, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Dan Dampak Disinformasi Terkait COVID-19 Terhadap Kesehatan Masyarakat

Pola penyebaran disinformasi terkait COVID-19 di masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial dan aplikasi pesan instan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta aplikasi WhatsApp menjadi saluran utama penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya, termasuk hoaks dan disinformasi. Kemudahan akses dan tingginya intensitas penggunaan media selama pandemi mempercepat laju penyebaran konten-konten menyesatkan (Pratama & Sari, 2024).

Disinformasi yang beredar selama pandemi COVID-19 memiliki beberapa pola utama. Pertama, banyak informasi palsu yang menonjolkan sentimen sensitif, seperti rasa takut, keresahan, dan ketidakpastian, sehingga mudah mempengaruhi emosi masyarakat. Kedua, motif penyebaran disinformasi seringkali disengaja, baik untuk tujuan politik, ekonomi, maupun sekadar menciptakan kepanikan public (Hidayat, 2021). Selain konten yang berkaitan langsung dengan kesehatan, seperti klaim obat mujarab, efek samping vaksin, dan konspirasi asal-usul virus, disinformasi juga muncul dalam bentuk isu politik dan sosial yang mengaitkan pandemi dengan kepentingan tertentu. Data menunjukkan bahwa kategori disinformasi politik mengenai COVID-19 menempati jumlah berita tertinggi setelah isu Kesehatan (Sihombing, 2022).

Penyebaran disinformasi tidak hanya dilakukan oleh individu anonim, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, figur publik, bahkan pejabat pemerintah. Keterlibatan tokoh-tokoh ini memperkuat narasi yang keliru dan memperluas jangkauan audiens, sehingga dampaknya semakin luas dan sulit dikendalikan. Salah satu pola yang menonjol adalah manipulasi konten, di mana informasi yang sebenarnya benar dikemas ulang atau diedit sedemikian rupa sehingga menyesatkan pembaca. Konten semacam ini seringkali lebih dipercaya karena tampak ilmiah atau didukung oleh visual yang meyakinkan (European Parliament, 2024).

Fenomena infodemi, yaitu banjir informasi yang tidak semuanya akurat, menjadi tantangan besar dalam penanganan pandemi. Masyarakat yang mencari kepastian di tengah situasi krisis justru semakin bingung karena banyaknya informasi yang saling bertentangan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan kesehatan, sehingga masyarakat sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan (Brennen et al., 2020). Salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Misalnya, adanya disinformasi yang menyatakan hanya

orang sakit yang perlu memakai masker membuat sebagian masyarakat mengabaikan anjuran penggunaan masker secara luas (RSKO Jakarta, 2025).

Selain itu, disinformasi menyebabkan masyarakat ragu atau bahkan menolak vaksinasi. Studi menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi sangat mempengaruhi keputusan individu dalam menerima vaksin COVID-19, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam mencapai herd immunity. Disinformasi juga memicu perilaku berisiko, seperti penggunaan obat-obatan yang tidak terbukti secara medis, pembelian produk secara panik, hingga praktik kesehatan yang keliru (Gabarron et al., 2021). Hal ini tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga memperburuk situasi pandemi secara keseluruhan. Keresahan, ketakutan, dan ketidakpastian akibat paparan disinformasi menyebabkan beban psikologis yang berat bagi masyarakat. Banyak orang menjadi cemas berlebihan, kehilangan kepercayaan pada institusi kesehatan, dan enggan mencari bantuan medis ketika mengalami gejala COVID-19 (Roozenbeek et al., 2020).

Dampak jangka panjang dari disinformasi adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas kesehatan. Ketika masyarakat merasa sering menerima informasi yang berubah-ubah atau tidak konsisten, mereka cenderung skeptis terhadap kebijakan dan anjuran resmi. Selain itu, disinformasi juga menghambat komunikasi publik yang efektif. Upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan menjadi kurang efektif karena masyarakat sudah terlanjur terpapar informasi keliru yang lebih meyakinkan secara emosional (Kouzy et al., 2020).

Pola penyebaran disinformasi yang cepat dan masif di media sosial juga membuat penanganannya menjadi sangat menantang. Upaya klarifikasi dan verifikasi informasi seringkali kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebaran hoaks dan disinformasi. Untuk mengatasi dampak negatif disinformasi, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi informasi dan kesehatan. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mendorong perilaku yang lebih rasional dalam menghadapi pandemi (Chou et al., 2020).

Akhirnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa disinformasi adalah ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah pentingnya komunikasi publik yang konsisten, transparan, dan berbasis data, serta perlunya edukasi berkelanjutan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap arus informasi yang menyesatkan.

Strategi Mitigasi Disinformasi Pada COVID-19

Strategi mitigasi disinformasi terkait COVID-19 memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dan platform digital. Salah satu langkah utama adalah penguatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Literasi digital yang baik membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, dan mengenali sumber yang kredibel, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh arus infodemik yang massif (Suarez-Lledo & Alvarez-Galvez, 2021).

Pendidikan literasi digital harus dilakukan secara sistematis dan inklusif, melalui program pelatihan yang menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Materi pelatihan dapat meliputi cara memverifikasi informasi, mengenali ciri-ciri hoaks, serta memahami pentingnya hanya membagikan informasi yang telah diverifikasi. Kegiatan ini dapat melibatkan sekolah, universitas, komunitas lokal, hingga organisasi keagamaan (Loomba et al., 2021). Selain edukasi, penguatan regulasi media sosial menjadi strategi penting. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten yang berpotensi menyesatkan. Implementasi algoritma kecerdasan buatan dan pembentukan tim verifikasi independen dapat

membantu moderasi konten dan mendeteksi hoaks secara lebih efektif (Pulido et al., 2020).

Kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial juga diperlukan untuk mengembangkan fitur pelaporan hoaks yang mudah diakses masyarakat. Fitur ini memungkinkan pengguna melaporkan konten mencurigakan, yang kemudian dapat diverifikasi oleh tim khusus sebelum diambil tindakan lebih lanjut, seperti penghapusan atau pemberian label peringatan. Pengelolaan informasi publik oleh institusi pemerintah harus dilakukan secara terpusat namun tetap responsif dan transparan. Pemerintah perlu menyediakan kanal resmi informasi yang mudah diakses, seperti website, aplikasi, dan akun media sosial resmi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan terkini (Ahmed et al., 2020).

Desentralisasi pengelolaan informasi juga penting agar setiap daerah dapat menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik lokal. Penguatan kelembagaan di tingkat daerah, termasuk pelatihan petugas informasi publik, dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan penanggulangan hoaks di wilayah masing-masing. Strategi kontranarasi atau counter-narrative menjadi intervensi penting dalam melawan hoaks. Kontranarasi adalah upaya membangun narasi tandingan yang berbasis sains dan data, dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Pesan-pesan kontranarasi harus disesuaikan dengan persepsi risiko dan budaya lokal agar lebih mudah diterima dan dipercaya public (Rahmawati, 2020).

Penting juga untuk menerapkan strategi prebunking, yaitu antisipasi sebelum hoaks muncul. Prebunking dilakukan dengan mendesain pesan komunikasi yang telah menginokulasi masyarakat terhadap potensi disinformasi, misalnya dengan mengedukasi tentang pola umum hoaks atau membangun kewaspadaan terhadap informasi yang belum diverifikasi (Wakene et al., 2024). Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer digital sangat strategis dalam menyebarkan pesan kontranarasi dan edukasi literasi digital. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan opini publik, sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam membangun ketahanan informasi Masyarakat (Smith & Lee, 2024).

Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran disinformasi juga diperlukan. Pemerintah dapat memperkuat perangkat hukum yang sudah ada, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran hoaks dan disinformasi.

Upaya mitigasi juga harus memperhatikan aspek psikososial masyarakat. Penyebaran informasi yang menenangkan, empatik, dan tidak menakutkan dapat membantu mengurangi kepanikan dan kecemasan akibat infodemi. Komunikasi risiko yang baik harus mengedepankan transparansi, konsistensi, dan kejelasan pesan. Ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, termasuk layanan konsultasi daring, juga perlu diperkuat sebagai bagian dari mitigasi. Masyarakat yang memiliki akses mudah ke sumber informasi dan layanan kesehatan yang kredibel akan lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi (Kisa & Kisa, 2025).

Strategi mitigasi harus dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika penyebaran informasi dan perubahan perilaku masyarakat. Monitoring dan riset tentang pola penyebaran disinformasi dapat memberikan data penting untuk pengambilan keputusan dan perbaikan strategi ke depan (Kisa & Kisa, 2024).

Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun sistem pelaporan dan respons cepat terhadap isu-isu hoaks yang berkembang. Sistem ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat sebelum disinformasi meluas dan berdampak lebih besar pada masyarakat. Penting juga untuk mendorong keterlibatan media massa dalam upaya mitigasi. Media harus mengedepankan prinsip jurnalisme berbasis fakta, melakukan verifikasi ketat, dan aktif dalam mengklarifikasi informasi keliru yang beredar di Masyarakat (Chen & Kumar, 2025).

Akhirnya, mitigasi disinformasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi antara negara, masyarakat, media, dan platform digital menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan informasi yang tangguh di era krisis seperti pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa seriusnya ancaman disinformasi terhadap kesehatan masyarakat. Pola penyebaran yang masif melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat narasi keliru, telah menyebabkan kebingungan, kepanikan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pemerintah. Dampak nyata dari disinformasi ini terlihat pada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, keraguan terhadap vaksinasi, serta meningkatnya beban psikologis akibat ketidakpastian informasi.

Strategi mitigasi yang efektif harus melibatkan peningkatan literasi digital dan kesehatan, penguatan regulasi serta penegakan hukum, optimalisasi komunikasi publik yang transparan, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, media, platform digital, dan tokoh masyarakat. Upaya kontranarasi, prebunking, serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dan klarifikasi informasi menjadi langkah penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap arus disinformasi.

Dengan pembelajaran dari pandemi COVID-19, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sistem mitigasi disinformasi secara berkelanjutan. Sinergi dan komitmen bersama sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap menghadapi krisis informasi di masa depan, sehingga kesehatan publik dapat terlindungi secara optimal.

REFERENSI

- Ahmed, W., Vidal-Alaball, J., & Downing, J. (2020). COVID-19 and the 5G conspiracy theory: Social network analysis of Twitter data. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/19458>
- Apuke, O. D., & Omar, B. (2021). The COVID-19 Infodemic—Applying the Health Belief Model to Identify Predictors of Misinformation Sharing. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.684866>
- Brennen, J. S., Simon, F. M., & Howard, P. N. (2020). Disinformation and social media during COVID-19: How have platforms responded? *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-028>
- Chen, W., & Kumar, R. (2025). Unravelling the Infodemic: A Systematic Review of Misinformation During the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Communication*.
- Chou, W.-Y. S., Gaysynsky, A., & Vanderpool, R. C. (2020). COVID-19 misinformation: A review of research trends. *Health Education & Behavior*. <https://doi.org/10.1177/1090198120980672>
- Cinelli, M., Quattrocioni, W., & Galeazzi, A. (2020). The COVID-19 Infodemic: Twitter versus Facebook. *Big Data & Society*. <https://doi.org/10.1177/2053951720989254>
- Effenberger, M., Kronbichler, A., & Shin, J. Y. (2020). The COVID-19 Infodemic: Infodemiology Study Analyzing Stigmatizing Search Terms. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/19619>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- European Parliament. (2024). *How to Reduce the Impact of Disinformation on Europeans' Health*. European Parliament.
- Gabarron, E., Oyeyemi, S. O., & Wynn, R. (2021). COVID-19-related misinformation on social media: A systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.276782>

- Hidayat, B. (2021). Peran Komunikasi Publik dalam Menanggapi Disinformasi Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Publik*.
- Islam, M. S., Sarkar, T., & Khan, S. H. (2022). The impact of misinformation on the COVID-19 pandemic. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.12.001>
- Johnson, E. (2022). The Impact of Misinformation on the COVID-19 Pandemic. *PubMed Central*.
- Kisa, S., & Kisa, A. (2024). A Comprehensive Analysis of COVID-19 Misinformation, Public Health Impacts, and Communication Strategies: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/56931>
- Kisa, S., & Kisa, A. (2025). Unravelling the infodemic: A systematic review of misinformation during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Communication*. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1560936>
- Kouzy, R., Abi Jaoude, J., & Kraitem, A. (2020). COVID-19 misinformation: Accuracy of articles about coronavirus prevention and treatment shared on social media. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/18644>
- Loomba, S., de Figueiredo, A., & Piatak, S. J. (2021). COVID-19 misinformation and vaccine hesitancy: A systematic review. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01056-1>
- Patel, A., & Garcia, L. (2023). The Role of Social Media in Health Misinformation and Disinformation During the COVID-19 Pandemic. *PubMed Central*.
- Persaud, S. (2023). The Misinformation Pandemic: Battling the Real Threat from Covid-19. *British Journal of Healthcare Management Research*. <https://doi.org/10.14738/bjhr.105.15818>
- Pratama, D., & Sari, I. (2024). Studi Resepsi Khalayak terhadap Disinformasi Pandemi COVID-19 di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*.
- Pulido, C. M., Villarejo-Carballido, B., Redondo-Sama, G., & Gómez, A. (2020). COVID-19 misinformation and disinformation on social media: A systematic review. *Social Media + Society*. <https://doi.org/10.1177/2056305120948254>
- Rahmawati, R. (2020). An Analysis on COVID-19 Disinformation Triangle in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jkm.122040>
- Roozenbeek, J., Schneider, C. R., & Dryhurst, S. (2020). COVID-19 vaccine hesitancy: The role of misinformation and disinformation. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-00987-3>
- RSKO Jakarta. (2025). *Data Hoaks Kesehatan Covid-19 yang Beredar*. RSKO Jakarta.
- Sihombing, R. (2022). *Kontribusi Disinformasi Pemerintah tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19*. Universitas Kristen Indonesia.
- Smith, J., & Lee, M. (2024). A Comprehensive Analysis of COVID-19 Misinformation, Public Health, and Communication Strategies. *Journal of Medical Internet Research*.
- Suarez-Lledo, V., & Alvarez-Galvez, J. (2021). COVID-19 misinformation on social media: A scoping review. *World Health Organization Bulletin*. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.276782>
- Tagliabue, F., Galassi, L., & Mariani, P. (2020). The 'Pandemic' of Disinformation in COVID-19. *SN Comprehensive Clinical Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s42399-020-00439-1>
- Torraco, R. J. (2020). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 19(4), 434–446. <https://doi.org/10.1177/1534484320951055>
- Wakene, A. D., Cooper, L. N., Hanna, J. J., Perl, T. M., Lehmann, C. U., & Medford, R. J. (2024). A pandemic of COVID-19 mis- and disinformation: Manual and automatic topic

analysis of the literature. *Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology*.
<https://doi.org/10.1017/ash.2024.379>
Zarocostas, J. (2020). The role of social media in COVID-19 misinformation and
disinformation. *The Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30461-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X)

Copyright Holder:

© Gunawan Widjaja, Dyah Ersita Yustanti (2025)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA